

## Analisis Determinan Belanja Modal dan Hubungannya Dengan PDRB (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)

Al Parok

Program Studi Keuangan Daerah, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia  
Email: [faruk.unja.ac.id](mailto:faruk.unja.ac.id)

### Abstract

This study aims to analyze what are the determinant factors that influence capital expenditure and its relationship with GRDP. The determinant factors in this study consist of Local Own Revenue (PAD), Profit Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Other Legal Regional Income (LPS) and Remaining Surplus Budget Calculation (SiLPA). The object of this research is the Regency/City Government in Jambi Province. The method of analysis in this study uses panel data regression analysis. This analysis found that Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Other Legal Regional Income (LPS) and Budget Calculation Overtime (SiLPA) simultaneously affect capital expenditure and partially only Regional Original Income (PAD) Revenue Sharing Fund (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Budget Calculation Overtime (SiLPA) have no effect on capital expenditure. Correlation analysis shows that capital expenditure has no significant relationship with GRDP.

**Keywords:** Determinants of Capital Expenditure, Capital Expenditure and GRDP



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Untuk membiayai belanja modal tersebut pemerintah daerah memerlukan dana yang tercermin dalam APBD antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Penelitian yang dilakukan oleh Syukry Abdullah dan Abdul Halim (2003) Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak digunakan lag pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah lebih kuat dari pada DAU, tetapi dengan digunakan lag pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah justru lebih kuat dari pada PAD. Penelitian oleh David Harianto dan Priyo Hari Adi (2007) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Penelitian oleh Askam Tuasikal (2008) secara simultan menunjukkan DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian oleh Dewi Nurcahyani (2013) Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa Kemandirian Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari sebgaiian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas merupakan faktor determinan belanja modal dan terdapat perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti

akan melakukan penelitian dengan objek yang berbeda yaitu pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan menambahkan variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Nuralan Darise (2008) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Dana Bagi Hasil**

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2004 dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Menurut Nurlan Darise (2008) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari teknis, dana penyesuaian dan bantuan dari teknis pemerintah daerah lain.

### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### **Belanja Daerah**

Menurut Ritonga (2009) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah maupun bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

### **Belanja Modal**

Dalam PSAP No 2 Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

## Produk Domestic Regional Bruto

Produk Domestic Regional Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

## METODE PENELITIAN

### Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini variabel-variabel yang diteliti terdiri dari variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPS), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), PDRB dan variabel dependen yaitu Belanja Modal. Populasi yang digunakan adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan jumlah 11 Kabupaten/Kota. Metode pengambilan sampel adalah purposif sampling adalah metode pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu.

### Metode dan Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dianalisis pada data sekunder. Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah lebih lanjut berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

### Teknis Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan model analisis regresi data panel untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja Modal sedangkan untuk hubungan antara Belanja Modal dengan PDRB menggunakan analisis korelasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Tahun 2008-2012

Bahwa rata-rata tingkat kemandirian daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dari Tahun 2008-2012 sebesar 6,09 berdasarkan kriteria menyatakan bahwa daerah tidak mampu untuk menuju kemandirian dan masih ketergantungan kepada bantuan pusat.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 7,239721 sedangkan  $F_{tabel}$  pada tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) adalah 2,318498. Hal ini berarti bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  memberikan arti bahwa secara simultan variabel variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

### Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

#### Variabel Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ) variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki  $p\text{-value } t\text{-stat } 0,6294 > 0,05$  maka variabel ini

berada pada daerah  $H_0$  diterima yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Variabel Dana Bagi Hasil**

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ) variabel Variabel Dana Bagi Hasil memiliki *p-value t-stat*  $0,523 > 0,05$  maka variabel ini berada pada daerah  $H_0$  diterima yang berarti variabel Variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Variabel Dana Alokasi Umum**

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ) variabel Variabel Dana Alokasi Umum memiliki *p-value t-stat*  $0,1236 > 0,05$  maka variabel ini berada pada daerah  $H_0$  diterima yang berarti Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Variabel Dana Alokasi Khusus**

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ) variabel Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki *p-value t-stat*  $0,0022 < 0,05$  maka variabel ini berada pada daerah  $H_0$  ditolak yang berarti Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Variabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ) variabel Variabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki *p-value t-stat*  $0,0052 < 0,05$  maka variabel ini berada pada daerah  $H_0$  ditolak yang berarti Variabel Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ) variabel Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memiliki *p-value t-stat*  $0,0677 > 0,05$  maka variabel ini berada pada daerah  $H_0$  diterima yang berarti Variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **Hubungan Belanja Modal dengan PDRB**

Berdasarkan hasil pengujian nilai korelasi sebesar  $0,108208$  yang berarti memiliki hubungan yang sangat rendah antara Belanja Modal dengan PDRB. Untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dan  $r_{tabel}$ . Diketahui  $r_{hitung}$  sebesar  $0,108208$  sedangkan  $r_{tabel}$ . (95%) ( $dk=n-2 = 50-2=48$ ) sehingga  $r_{tabel} = 0,284$ . Karena  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$  atau  $0,108208 < 0,284$ , maka disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Belanja Modal dengan PDRB. Hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi membeli barang-barang belanja modal yang tidak produktif.

#### **KESIMPULAN**

Rata-rata tingkat kemandirian daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dari Tahun 2008-2012 sebesar  $6,09$  berdasarkan kriteria menyatakan bahwa daerah tidak mampu untuk menuju kemandirian dan masih ketergantungan kepada bantuan pusat. secara simultan variabel variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Unun, Dana Alokasi

Khusus, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Analisis korelasi menunjukkan bahwa belanja modal tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan PDRB.

Untuk meningkatkan alokasi belanja modal maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dan pada akhirnya ketergantungan pada pemerintah pusat bisa berkurang. Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mampu mendorong pertumbuhan PDRB dan peningkatan ekonomi dengan cara membeli barang-barang belanja modal yang produktif. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya sampel dan objek penelitian lebih diperluas lagi dan bisa juga membandingkan dengan objek lainnya serta menambahkan jangka waktu penelitian yang lebih panjang dan variabel lainnya, karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal sehingga hipotesis yang ingin diharapkan dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syukry Abdullah, 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studu Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI Surabaya. November 2003.
- Abdul Halim, 2002. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
- Abdul Halim, 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba empat. Jakarta.
- Agus Widarjono, 2013. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Keempat. Penerbit UPP STM YKPN. Yogyakarta.
- Ahmad Yani, 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Supangat, 2007. Statistika untuk Ekonomi dan Bisnis. Penerbit Pustaka. Bandung.
- Askam Tuasikal, 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Vol 1, No 2, juli 2008 Hal 142-155.
- Dewi Nurcahyani, 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Tesis "Veteran" Yogyakarta.
- Nurlan Darise, 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Cetakan 1. Penerbit PT Indeks. Jakarta.
- Nurlan Darise, 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Cetakan 1. Edisi Kedua. PT Indeks. Jakarta.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010.
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).
- Ritonga, 2009. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia. Penerbit Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.